

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan Norma dalam Mewujudkan *Good Citizenship*

Fahimatul Anis¹, Fajar Surya Hutama², Prasetyo Adi Nugroho³

Universitas Jember^{1,2,3}

Corresponding Author: fahimatulanis.fkip@unej.ac.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma yang diperlukan untuk menciptakan warga negara yang baik (*good citizenship*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pembentukan karakter melalui pengajaran nilai-nilai dan norma. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan mahasiswa PGSD Universitas Jember sebagai subjek, serta mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan angket. Evaluasi keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, keterpercayaan, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran krusial dalam melestarikan nilai-nilai kewarganegaraan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mengembangkan pemikiran kritis, sikap rasional, serta kepribadian yang demokratis dan berakhlak mulia.

Kata kunci: *Good Citizenship*, Nilai dan Norma, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

Civic Education plays a crucial role in shaping the values and norms necessary to cultivate good citizenship. This study aims to examine the implementation of Civic Education (PKn) as a means of character development through the teaching of values and norms. Utilizing a qualitative research method, the study involves PGSD students at Universitas Jember as subjects, with data collected through observation, interviews, and questionnaires. Data validity is evaluated through tests of credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results indicate that students play a critical role in preserving civic values and applying them in daily life while developing critical thinking, rational attitudes, and character traits that are democratic, ethical, and morally upright.

Keywords: *Good Citizenship, Values and Norms, Civic Education.*

1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Muatan materi dalam PKn memberikan panduan bagi mahasiswa tentang cara menjadi warga negara yang baik. Di tengah meningkatnya tantangan sosial, seperti tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran norma, penting bagi pendidikan untuk melahirkan individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas. Sebagaimana dinyatakan oleh Daryanto (2017), pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter dan moral mahasiswa, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjawab tantangan ini dengan menanamkan pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Sari (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang efektif dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang tanggung jawab sosial dan politik, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat.

Hasil akhir dari pendidikan ini adalah terciptanya *good citizenship*, di mana setiap individu tidak hanya memahami tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020), pendidikan kewarganegaraan harus mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulumnya agar mahasiswa dapat memahami pentingnya peran mereka dalam masyarakat dan mewujudkan perilaku yang positif.

Dalam konteks globalisasi yang semakin pesat, nilai-nilai kewarganegaraan menjadi semakin relevan untuk dibahas. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif, salah satunya adalah munculnya konflik antarbudaya yang dapat memicu intoleransi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu menyiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ini dengan cara membangun sikap toleran dan menghargai perbedaan (Oktaviani, 2021). Penelitian oleh Nugroho (2019) menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai kebangsaan dapat membantu mahasiswa memahami dan menghargai keragaman budaya serta memperkuat identitas nasional di tengah pengaruh global.

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Hal ini penting karena keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang demokratis. Sebagaimana diungkapkan oleh Maulana (2018), partisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi akan meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan untuk tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam praktik-praktik demokrasi yang nyata. Melalui latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan norma dapat berkontribusi dalam membentuk *good citizenship* di kalangan mahasiswa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif. Pendekatan ini menerapkan metode deskriptif untuk mengungkapkan hasil penelitian melalui bahasa dan narasi dalam konteks alami yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan subjek penelitian berupa mahasiswa PGSD

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan dengan partisipasi pasif, di mana peneliti mengunjungi lokasi aktivitas subjek tanpa keterlibatan langsung. Wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, dirancang untuk menggali pandangan dan gagasan subjek terkait dengan fokus penelitian. Selain itu, data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel

ilmiah, pedoman pendidikan, dan dokumen lainnya digunakan sebagai pelengkap dan penguat temuan dari hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari individu yang memberikan informasi, khususnya dari guru-guru sekolah dasar, sementara data sekunder digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer. Proses pengolahan data kualitatif melibatkan tiga tahap utama, yaitu pengkondensasian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengkondensasian data dilakukan untuk menyederhanakan dan memperinci data yang berasal dari catatan lapangan dan transkrip wawancara guna memudahkan pemahaman. Penyajian data bertujuan untuk mengorganisir dan memfasilitasi pemahaman terhadap situasi penelitian dan perencanaan langkah-langkah selanjutnya. Verifikasi dilakukan untuk menjamin keabsahan data, dengan mempertimbangkan aspek reliabilitas dan transferabilitas, yang mencakup uji kredibilitas, transferabilitas, keterpercayaan, dan konfirmabilitas.

3. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan nilai dalam konteks pendidikan kewarganegaraan memiliki peran fundamental dalam mencapai tujuan filosofis pendidikan, yang berfokus pada pembentukan individu yang menghargai dan menghormati harkat serta martabat sesama. Driyarkara (1991) mengemukakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia secara utuh, meliputi kecerdasan emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam lingkungan pendidikan, setiap individu diharapkan tidak hanya mampu menguasai aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Hasil observasi dan wawancara dengan mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Jember menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan kampus, mahasiswa secara aktif berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat. Mereka membantu adik-adik SD dan terlibat dalam bakti sosial yang dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Mahasiswa tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga terlibat dalam aktivitas mengajar, yang menunjukkan sikap kepedulian dan tanggung jawab sosial. Salah satu mahasiswa menyatakan, "Saya merasa bangga bisa berbagi ilmu dan membantu anak-anak di kampung ini. Ini membuat saya sadar akan tanggung jawab saya sebagai warga negara."

Kymlicka (2001) menekankan bahwa kesadaran moral tidak terpisah dari peran atau status individu, melainkan berakar pada kemampuan untuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain serta memiliki kepedulian sosial. Mahasiswa juga mengungkapkan bahwa melalui pengalaman belajar di lapangan, mereka belajar untuk menghargai keragaman budaya dan memahami perspektif orang lain. Misalnya, dalam diskusi kelompok mengenai isu-isu sosial, mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya saling berbagi pandangan, yang memperkaya pemahaman mereka tentang toleransi dan kerjasama. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan nilai yang diungkapkan oleh Lickona (1991), di mana pendidikan kewarganegaraan harus menciptakan individu yang dapat menghargai sesama, membangun manusia yang utuh, serta memiliki keseimbangan antara kecerdasan emosional, intelektual, dan moral.

Implementasi pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus memberikan pengalaman belajar yang komprehensif, mencakup aspek *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*. Ini penting untuk menumbuhkan wawasan, sikap, dan perilaku demokratis yang bertanggung jawab (Somantri, 2001). Dalam hal ini, mahasiswa PGSD telah menunjukkan inisiatif untuk menciptakan proyek bersama yang berfokus pada isu-isu lingkungan, seperti kampanye pengurangan penggunaan plastik di sekitar kampus. Salah satu mahasiswa menjelaskan, "Kami berupaya untuk mengajak teman-teman lain ikut serta dalam menjaga lingkungan."

Tuntutan pedagogis dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pendidikan kewarganegaraan memerlukan pengalaman belajar yang terpadu, di mana pendekatan yang digunakan harus mencakup berbagai dimensi, seperti kognitif, nilai, dan perilaku. Konsep "*confluent education*" yang diusulkan oleh Lickona (1991) menekankan bahwa pembelajaran yang efektif harus mengintegrasikan aspek kognitif dan afektif. Dalam

konteks ini, mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya memahami teori-teori tentang kewarganegaraan tetapi juga mampu menerapkannya dalam tindakan nyata di masyarakat.

Dalam hal ini, guru perlu merumuskan implikasi dari isi pendidikan kewarganegaraan terhadap wawasan, sikap, dan perilaku demokratis (Print, 1993). Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan harus mencakup keterpaduan dalam pendidikan moral, di mana fokus tidak hanya pada pengajaran nilai-nilai kognitif, tetapi juga pada nilai-nilai moral. Proses ini mengajarkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik, berkarakter, dan bertanggung jawab, sejalan dengan pendekatan Piaget dan Kohlberg yang mendorong pemahaman, penginternalisasian, dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kohlberg, 1984). Selain itu, pendidikan demokrasi dalam konteks kewarganegaraan bersifat multidimensional, mencakup pendidikan demokrasi, moral, sosial, dan politik, dengan tujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, bermoral, sosial, dan menghormati keberagaman (Banks, 2008). Terakhir, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan karakter berlandaskan Pancasila, yang membutuhkan keterpaduan antara konsep, sikap, dan perilaku moral yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Tilaar, 2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di kalangan mahasiswa PGSD Universitas Jember memiliki dampak signifikan dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan. Melalui observasi dan wawancara, ditemukan beberapa poin penting. Pertama, penguatan nilai-nilai kewarganegaraan terlihat dari pemahaman mendalam mahasiswa tentang nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pembelajaran berbasis pengalaman membantu mereka menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan teori pendidikan nilai yang diungkapkan oleh Lickona (1991).

Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial terkait kewarganegaraan memperkuat pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Duffy (2014) menekankan bahwa keterlibatan sosial adalah cara efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Selanjutnya, PKn terbukti efektif sebagai sarana pembentukan karakter, mengajarkan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa PGSD Unej diantaranya memberikan bantuan pangan dari hasil kegiatan *Project Based Learning* mata kuliah konsep dasar pkn bagi orang-orang sekitar yang sangat membutuhkan. (Anis *et al.*, 2024) Lickona (1991) menggarisbawahi bahwa pendidikan karakter harus mencakup pengajaran nilai, keterampilan, dan kebiasaan baik.

Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi PKn, seperti kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan keterbatasan sumber daya. Gibbons (2013) menunjukkan bahwa tantangan ini dapat menghambat efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter siswa, sehingga kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran PKn. Terakhir, implementasi PKn diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku mahasiswa sebagai warga negara. Penelitian Hart (2004) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat membentuk individu yang proaktif dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas kewarganegaraan di tingkat nasional. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekadar mata pelajaran yang mengajarkan teori tentang negara, melainkan juga merupakan pendidikan moral yang bertujuan membentuk individu yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural dan demokratis. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional yang menekankan pada pengembangan warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab (Kemendikbud, 2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, jika dilaksanakan dengan baik, dapat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan yang positif di kalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan nilai dan Pendidikan hukum akan mengantarkan warganegara menjadi warganegara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*)

yang ditandai dengan terwujudnya warganegara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. (Gustiani, Shalikhah and Maulia, 2023).

4. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang krusial dalam pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan siswa. Melalui pengajaran nilai-nilai dan norma-norma PKn, siswa diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) memiliki tanggung jawab besar dalam mentransfer pendidikan nilai ini kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk mengintegrasikan PKn dalam pengalaman belajar yang komprehensif dan berbasis partisipasi aktif siswa.

Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang berkarakter, berintegritas, dan memberikan kontribusi positif. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi PKn, disarankan agar kurikulum PKn lebih terintegrasi dengan pengalaman belajar yang partisipatif, sehingga siswa dapat berkontribusi secara aktif dalam diskusi dan kegiatan sosial.

Selanjutnya, kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran PKn. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru juga harus menjadi prioritas, agar mereka dapat menerapkan metode pengajaran yang inovatif dan menarik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PKn tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran teoritis, tetapi juga sebagai wahana yang efektif dalam membentuk individu yang berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, sehingga berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

5. Daftar Pustaka

- Anis, F. *et al.* (2024) 'Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Project Based Learning di Kelurahan Sempusari Kabupaten Jember', 3(2), pp. 31–35.
- Banks, J. A. (2008). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Wiley.
- Daryanto. (2017). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep dan implementasi*. Gava Media.
- Duffy, K. G. (2014). *The role of service-learning in the development of citizenship*. *Journal of Education and Human Development*, 3(1), 83-90.
- Driyarkara, D. (1991). *Pengantar pendidikan nilai*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gibbons, S. (2013). *Challenges in citizenship education: A global perspective*. Routledge.
- Gustiani, E., Shalikhah, S.W.A. and Maulia, S.T. (2023) 'Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dan Pendidikan Hukum dalam mewujudkan Warga Negara yang Cerdas dan Baik', *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), pp. 1–10. Available at: <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Hart, D. (2004). *Learning to be a citizen: The role of civic education in the development of engaged citizens*. *Education Week*, 24(16), 20-21.
- Hidayati, S., & Sari, R. (2020). *Pengaruh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran sosial siswa*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(3), 231-240.

-
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan karakter bangsa*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kohlberg, L. (1984). *Essays on moral development: Volume one - The philosophy of moral development*. Harper & Row.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the vernacular: Nationalism, multiculturalism, and citizenship*. Oxford University Press.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Maulana, A. (2018). *Peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter demokratis*. *Jurnal Pendidikan*, 4(1), 45-56.
- Nugroho, S. (2019). *Kewarganegaraan dalam konteks pendidikan: Memahami keragaman budaya dan identitas nasional*. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 134-145.
- Oktaviani, S. (2021). *Globalisasi dan tantangan pendidikan kewarganegaraan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(1), 21-30.
- Print, M. (1993). *Civic education and the democratic citizen: An Australian perspective*. *Australian Journal of Education*, 37(2), 164-182.
- Somantri, D. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan: Konsep, paradigma, dan aplikasinya*. Sinar Grafika.